



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 10 Januari 2017

Halaman: 9

Keamanan Terminal DPRD Pertanyakan

UMBULHARJO, BERNAS

-- Komisi C DPRD Kota Yogyakarta mengkhawatirkan pelayanan penumpang di Terminal Giwangan Yogyakarta tidak bisa dilakukan secara maksimal karena pengambilalihan terminal oleh pemerintah pusat hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan.

"Salah satunya adalah tidak ada penarikan retribusi atau peron kepada penumpang yang masuk ke terminal. Artinya, siapa saja bisa masuk ke terminal dengan bebas, bukan hanya penumpang saja. Bagaimana dengan keamanannya," kata Suwanto, Sekretaris Komisi C

DPRD Kota Yogyakarta, Senin (9/1) kemarin.

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan hal tersebut agar pelayanan kepada pengguna jasa di Terminal Giwangan tetap bisa dilakukan secara maksimal dan calon penumpang pun merasa aman dan nyaman saat berada di terminal.

"Bukan nominal dana dari penarikan peron, tetapi pelayanan, kenyamanan dan keamanan penumpang perlu diutamakan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, masih ada sejumlah persoalan dalam pengambilalihan Terminal Giwangan di antaranya batasan

kewenangan pengelolaan terminal oleh pemerintah pusat, aset terminal, status sengketa mengenai Terminal Giwangan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT Perwita Karya serta kejelasan nasib pegawai non PNS di terminal.

"Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak mampu memberikan penjelasan dengan tegas dan jelas. Kami akan undang tim pengambilalihan terminal dan melakukan advokasi ke Kementerian Perhubungan mengenai masalah ini," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho mengatakan, status

Terminal Giwangan sudah pasti diambil alih oleh pemerintah pusat meskipun hingga kini detail pengambilalihan masih terus dibahas secara rinci.

"Untuk anggaran operasional memang tidak lagi dianggarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan kami tidak bisa memungut retribusi. Harus ada peraturan pemerintah untuk hal itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Wirawan, pemerintah kota hanya bisa berharap agar pemerintah pusat segera menetapkan peraturan pemerintah untuk menarik retribusi secara legal.

Setiap tahun, Terminal Gi-

wangan membutuhkan biaya operasional sekitar Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar, dengan pendapatan dari retribusi sekitar Rp 3 miliar.

"Retribusi itu yang kemudian digunakan untuk operasional terminal," katanya.

Ia pun menolak jika Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta lepas tangan untuk operasional Terminal Giwangan saat ini.

"Kami hanya mengikuti UU Nomor 23 Tahun 2014 saja. Tidak berarti kami lepas tangan karena UU menyatakan pengambilalihan terminal oleh pusat," katanya.

(ant/m3)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005